

Politik Identitas dan Polarisasi Demokrasi di Indonesia: Ancaman terhadap Keutuhan Sosial dalam Negara Plural

¹Yudith Yunita, ²Muharam Albana

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Trimasda Cilegon, Indonesia

¹yudithyunita@gmail.com, ²pontangpantingdulu@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to critically examine the dynamics of identity politics in Indonesia and its implications for social cohesion. Using a qualitative approach based on an extensive literature review, the research analyzes historical and contemporary cases, including the 2017 Jakarta gubernatorial election and the 2019 presidential election, as empirical illustrations of identity-based political mobilization. The findings reveal three distinct and recurring patterns: (1) the use of identity politics as a tool for discrimination against minority groups, resulting in unequal policy benefits and political marginalization; (2) the intensification of religious-based polarization, which extends beyond electoral periods into everyday social interactions and digital discourse; and (3) the reinforcement of ethnic and racial stereotypes, particularly toward groups perceived as politically dominant. These patterns collectively undermine national integration, deepen social fragmentation, and erode democratic quality. The article argues that addressing these risks requires a shift toward deliberative multiculturalism and a politics of recognition, supported by constitutional guarantees of equality and non-discrimination. This normative framework is proposed as a pathway to mitigate the negative impacts of identity politics while preserving democratic vibrancy in a plural nation-state.

Keywords: Democracy, Identity politics, Pluralism, Polarization, Social cohesion

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dinamika politik identitas di Indonesia beserta implikasinya terhadap kohesi sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka yang komprehensif, kajian ini menganalisis kasus historis dan kontemporer, termasuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilihan Presiden tahun 2019, sebagai ilustrasi empirik dari mobilisasi politik berbasis identitas. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga pola yang khas dan berulang: (1) penggunaan politik identitas sebagai instrumen diskriminasi terhadap kelompok minoritas, yang berdampak pada ketimpangan kebijakan dan marjinalisasi politik; (2) menguatnya polarisasi berbasis agama yang meluas melampaui periode elektoral hingga ke interaksi sosial sehari-hari dan percakapan di ruang digital; serta (3) penguatan stereotip etnis dan ras, khususnya terhadap kelompok yang dipersepsikan sebagai dominan secara politik. Ketiga pola ini secara kolektif mengancam integrasi nasional, memperdalam fragmentasi sosial, dan menurunkan kualitas demokrasi. Artikel ini mengajukan perlunya pergeseran menuju multikulturalisme deliberatif dan politik pengakuan, yang diperkuat oleh jaminan konstitusional atas kesetaraan dan non-diskriminasi, sebagai kerangka normatif untuk memitigasi dampak negatif politik identitas sekaligus menjaga vitalitas demokrasi di negara majemuk.

Kata Kunci: Demokrasi, Kohesi sosial, Politik identitas, Pluralisme, Polarisasi,

Pendahuluan

Sejarah dunia mencatat banyak peristiwa yang mengubah wajah peradaban, namun sedikit yang meninggalkan luka sedalam tragedi Holocaust. Pada masa Perang Dunia II, di bawah kepemimpinan diktator Adolf Hitler, Jerman menyaksikan kebangkitan ideologi politik yang bertumpu pada supremasi identitas. Ras Arya ditempatkan di puncak hierarki sosial, sementara kaum Yahudi diposisikan sebagai ancaman eksistensial. Propaganda yang terus-menerus menanamkan narasi kebencian terhadap perbedaan ras dan agama membentuk opini publik yang menjustifikasi diskriminasi, pengucilan, hingga genosida. Kebijakan ini bukan hanya tindakan militer atau politik, tetapi strategi yang membangun batas sosial tak kasat mata, sehingga terlihat memisahkan siapa yang dianggap “pribumi” dan siapa yang dianggap “asing.”

Konflik ini terjadi pada tahun 1941-1945 yang akhirnya lebih dikenal dengan praktik genosida terhadap para keturunan yahudi, akibat dari berkembangnya yahudi di Eropa melalui pesatnya keturunan, perkembangan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Hal demikian menyebabkan Adolf Hitler sebagai Ras Arya merasa terancam, dan memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap kaum yahudi. Demikian Tempo menjelaskan bahwa bangsa Eropa sebenarnya telah memiliki prasangka mengenai bangsa Yahudi yang dianggap telah bertanggung jawab atas kematian Yesus (Tempo.co, 2022). Akhirnya, sebagian besar rakyat Eropa mulai mengucilkan bangsa Yahudi. Pada abad ke 19, sebagian bangsa Eropa keliru menganggap bahwa Yahudi bertanggung jawab atas banyak masalah sosial dan politik yang ada di industri modern. Akhirnya, Nazi memanfaatkan kebencian ini untuk menggolong-golongkan berbagai ras terhadap orientasi pandangan dunia.

Dari sejarah uraian di atas, dapat diambil pelajaran bahwa, terlepas dari perang dunia yang melibatkan yahudi, tetapi praktek genosida yang terjadi pertama adalah diawali oleh konflik antar Ras Arya dengan Yahudi, yang dalam kasus Adolf Hitler ini sebetulnya ke dua Ras tersebut hidup dalam satu Negara di Jerman, yang kedua adalah karena isu keyakinan agama dimana bangsa Eropa yang mayoritas Kristiani menganggap Yahudi harus bertanggungjawab atas kematian Yesus.

Pada dua asumsi tersebut, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa akar dari persoalannya adalah masalah identitas, baik dari asal usul suku bangsa/Ras maupun perbedaan dari keyakinan. Suku bangsa satu merasa lebih unggul daripada suku bangsa lain. Kemudian, pada kehadiran suku bangsa yang mulai menonjol, dianggap sebagai ancaman, maka ini adalah bentuk identitas yang salah, disamping dengan pengakuan terhadap identitas lainnya yang bersandar pada etika hidup melampaui kebijaksanaan dan kearifan untuk dapat hidup berdampingan dengan siapapun dan apapun unsur yang ada di lingkungan dan bumi.

Adanya hegemoni satu ras terhadap ras lain menyebabkan kerentanan terhadap stabilitas hubungan sosial antar individu dan antar masyarakat yang berbeda ras, kerentanan ini dapat menyebabkan konflik yang berkembang dan berkepanjangan, memperlebar jarak sosial, dengan diperkuat pada fanatisme yang sempit dan keakuan. Dengan uraian di atas, peneliti sengaja menarik kasus genosida yahudi oleh Adolf Hitler dengan kelompok Nazi dan kekuasaannya di Jerman, sebagai persoalan yang berasal identitas, lalu mencoba mengembangkan pembahasan yang bertema politik identitas dengan judul politik identitas, mengoyak demokrasi dengan polarisasi di negara plural.

Walau skala dan bentuknya berbeda, fenomena serupa juga dapat ditemukan di era modern, termasuk di Indonesia. Negara ini dibangun di atas fondasi keberagaman—ratusan etnis, berbagai agama, beragam bahasa daerah—namun justru di sinilah politik identitas

menemukan lahan subur. Sejak diberlakukannya pemilu langsung, baik di tingkat nasional maupun daerah, isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) semakin sering dimanfaatkan sebagai strategi kampanye. Mobilisasi massa berbasis kesamaan identitas menjadi cara cepat untuk membangun loyalitas politik, tetapi pada saat yang sama memperlebar jarak sosial dengan pihak yang berbeda.

Politik identitas menjadi tema yang kerap dibahas dalam diskusi-diskusi akademisi, masyarakat, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, terlebih pada saat musim pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu). Terdapat nilai yang menjadi kontroversi tentang politik identitas, meskipun banyak dari politisi memanfaatkan politik identitas sebagai bahan materi kampanye.

Politik identitas adalah komoditas yang mudah untuk dikampanyekan, karena memiliki daya pikat yang cukup erat dan cepat, sebab didasari pada suatu kesamaan entitas individu pada masyarakat, dalam bentuk yang terkecil sampai yang terluas, memudahkan untuk memobilisasi masyarakat sebagai calon pemilih, berdasar pada kesamaan tersebut dapat cepat terbentuk rasa empati antar sesama. Politik identitas rentan dimasyarakat dikarenakan akan terjadinya konflik yang kompleks.

Politik identitas kemudian diidentifikasi pada terbentuknya polarisasi dalam kelompok masyarakat, seperti yang disampaikan oleh seorang ahli berikut ini: Politik identitas lebih kepada sikap politik yang berfokus pada sub- kelompok dan merujuk pada aktivisme atau merujuk pada pencarian status yang dilandaskan pada katagori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya (Ubed, 2002).

Politik identitas merupakan isu yang amat membahayakan bagi kondusifitas di lingkungan masyarakat dan negara pada umumnya dikareenakan, ada istilah yang disebut dengan isu SARA (suku, Agama, Ras dan Antar golongan), dan ini menjadi isu yang amat sensitive di Negara-Negara dengan ragam suku bangsa disertai perbedaan warna kulit, Bahasa, rambut, kepercayaan dan budaya, terlebih pada negara dengan wilayah kepulauan yang seakan menjadi pembeda wilayah antar masyarakat masing-masing yang mendiaminya, contohnya di negara kita Indonesia.

Pasal 28D UUD 1945, menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang dimana politik identitas yang diskriminatif melanggar prinsip equal treatment dan non-discrimination dalam kandungan pasal undang-undang tersebut. Politik identitas akan menjadi alat politik yang digunakan para elit politik ataupun penguasa sebagai tindakan retorika politik dengan sebutan kami bagi "orang asli" yang menginginkan kekuasaan bagi "orang pendatang" yang mau tidak mau melepaskan kekuasaan. Dengan demikian politik identitas ini hanyalah alat yang digunakan para penguasa untuk mendapatkan kekuasaan serta kepentingan kelompok saja, termasuk dengan kepentingan ekonomi mereka menjadi alat penghalang dan manipulatif data yang sebenarnya. Di Indonesia sendiri, terdapat aturan yang baku dan jelas mengenai hal ini, yaitu hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan jelas politik identitas ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut (Pasal 28I UUD 1945).

Karakteristik politik identitas yang disebutkan oleh Klaus Von Beyme (Ubaidillah, 2002) dibagi menjadi 3 yaitu : (1) Membangun kembali narasi besar yang prinsipnya ditolak serta membangun suatu teori yang mengendalikan factor-faktor biologis contohnya. sebagai penyusun perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupan menjadi gerakan politik identitas. (2)

Tendensi untuk membangun sistem apartheid terbaik menjadi gerakan politik identitas. Kekeuasaan jika tidak dapat digunakan maka pengecualiaan diri alternatifnya. (3) Kelemahan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu.

Lalu, politik indentitas pada praktiknya berkembang pada hal-hal yang memaksakan persamaan dengan tidak segan untuk memperlebar jarak pada perbedaan, keadaan ini terbentuk atas rasa sadar seorang politisi atau pun tidak mempersatukan masyarakat mayoritas atau pun minoritas dengan gagasan dan aspirasi, menempatkan rakyat sebagai panglima yang selalu didahulukan kepentingannya.

Para politisi yang mengumbar tentang politik identitas menjadi kontributor terbesar dalam perpecahan pada masyarakat pada saat pemilu juga pasca pemilu, yang seharusnya politisi dapat berperan sebagai tauladan dalam masyarakat, dengan menguatkan persatuan dan kesatuan, melalui semangat berdemokrasi melalui penyampaian gagasan dan ide. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari seorang pemikir yang berasal dari Hungaria bernama Agnes Heller dalam tulisan Putut Trihusodo (2023), mendefinisikan bahwa:

“politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatinnya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Ada pun unsur perbedaan itu dibangun berdasarkan pada karakter biologis (ragawi) seperti warna kulit, ras, suku, dan agama. Dalam hal ini adalah dipandang sebagai faktor bawaan, dan memang pada kenyataannya demikian. Titik pandang berpangkal dari sana. Contoh soal, kalau ada sekelompok warga tertinggal maka dilihatlah dari isu ras, etnik, agama, asosiasi budaya dan sejenisnya. Fator sosial yang lain nomor dua. Tak heran bila politik identitas ini juga disebut sebagai biopolitik”.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan, Penelitian kualitatif ini berfokus pada eksplorasi makna, pengalaman yang terjadi, serta perspektif individu maupun kelompok yang terjadi pada konteks tertentu, menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan menganalisis dokumen, kasus atau kejadian - kejadian yang terjadi sesuai fakta yang ada atau biasa disebut observasi partisipatif, interaksi social maupun catatan lapangan Adapun focus utama dari penelitian kualitatif ini adalah ada pada “mengapa” dan “bagaimana” dima ketika ada suatu fenomena terjadi jawabannya bukan sekedar “apa” yang terjadi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Para politisi dapat diuntungkan dengan perbedaan, menguatkan identitas yang dapat membedakan antara politisi satu dengan politisi lain, meraup suara yang sebanyak-banyaknya dari suatu persamaan daerah asal, suku bangsa, agama/keyakinan, atau pun hanya sekedar kesamaan tentang garis keturunan. Di sisi lain, politisi yang berasal dari pihak minoritas akan ada dalamposisi yang tidak menguntungkan.

Catatan buruk dari politik identitas, coba diidentifikasi kepada beberapa point persoalan, yang pertama adalah diskriminasi dan mendiskreditkan minoritas. Bahwa, dalam kasus ini kelompok yang lebih besar akan mendominasi pada kelompok yang lebih kecil dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada kebijakan program yang akan cenderung menguntungkan untuk mayoritas, kelompok yang lebih besar menganggap bahwa kemenangan politik yang didapatkan secara otomatis membuat otoritas mereka besar juga, ego kelompok yang tidak melihat kelompok lain sebagai bagian daripadanya, sebagai sesama warga negara

yang sama memiliki hak, sedangkan negara harus dapat menjamin setiap warganya, meskipun melalui klasifikasi kebutuhan berdasarkan prioritas. Ketika Politik identitas dijadikan Gong dalam pemilu maka biasanya efektifitas hasil suara akan diraup dengan mudahnya. Diluar dari pada dampak politik identitas yang sangat amat rawan konflik.

Catatan kedua adalah, rentan terjadinya konflik agama. Sejak pemilu dilaksanakan secara langsung dengan setali tiga uang pada pelaksanaan pemerintahan daerah, issue yang cukup mencolok juga diperlihatkan secara kasuistis pada pemilu DKI Jakarta tahun 2017, karena diakui atau tidak, pasangan calon yang kalah dirugikan dengan persoalan penistaan agama yang dilakukannya, dan penistaan agama ini menjadi issue politik yang ikut menentukan pada hasil pemilu. Realitas pengenaan identitas agama sebagai politik identitas juga dilihat pada pilpres jilid II Jokowi vs Prabowo, yang di mana satu pihak mengidentikan pada simbol-simbol salah satu agama, dan cukup membuat satu pihak lain mencari cara agar dapat mencounternya, yang pada akhirnya salah satu pihak sebagai calon presiden berpasangan dengan tokoh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia sebagai calon wakil presiden, terakhir calon tersebut akhirnya dapat memenangkan pemilu calon presiden dan wakil presiden.

Pada kasus kedua, merupakan konflik yang lebih riskan karena melibatkan satu agama ke dalam konflik yang dipolarisasikan kepada kelompok garis keras dan kelompok toleran. Sensitifitas antara keduanya berlanjut pada aktivitas kehidupan sehari-hari dan aktivitas di media sosial, preferensi pada pemilu mendikotomikan keduanya pada perbedaan yang curam, dan konflik ini lebih terasa pada level horizontal yaitu antara individu dengan individu atau antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain.

Dalam pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi ilustrasi konkret dari penggunaan politik identitas sebagai instrumen eksklusif. Von Beyme menyebut kecenderungan politik identitas membangun narasi besar yang mengendalikan faktor biologis atau kultural untuk membentuk garis pemisah yang jelas. Dalam kontestasi ini, identitas agama dijadikan narasi besar untuk menentukan kelayakan seorang kandidat, sementara isu kebijakan publik nyaris tenggelam. Analisis ini sejalan dengan konsep *politics of recognition* dari Taylor (1994), di mana kegagalan negara atau masyarakat mengakui keberadaan dan martabat kelompok tertentu akan menghasilkan alienasi politik. Dampaknya tidak hanya pada hasil elektoral, tetapi juga pada meningkatnya rasa keterasingan di kalangan kelompok minoritas agama.

Catatan ketiga, adalah Suku Bangsa dan Ras yang terancam saling tidak saling menghargai, bahkan cenderung mencurigai satu sama lain. Hal ini diakibatkan juga oleh anggapan bahwa suku bangsa dan ras yang mayoritas selalu menghegemoni terhadap suku bangsa dan ras yang lebih kecil. Adanya anggapan bahwa presiden di Indonesia selalu dari pulau Jawa atau bahkan suku bangsa Jawa. Anggapan ini menjadi sinisme terhadap suku bangsa Jawa yang memang secara populasi di Indonesia adalah paling banyak, dan sepanjang sejarah yang ada di Indonesia. memang presiden yang dihasilkan melalui pemilu selalu berasal dari Jawa yang keluar sebagai pemenang.

Dari Sejarah dunia yang terjadi pun bahwa ras kulit putih di Amerika Serikat bahkan mungkin juga di daratan Eropa dan Australia menganggap dirinya lebih unggul dari ras kulit hitam, kemudian kulit hitam kerap diposisikan sebagai warga kelas dua di negaranya. Catatan-catatan yang diuraikan tersebut adalah fenomena yang dapat terjadi atau sudah terjadi, yang akan berdampak negative bagi demokrasi di negara besar seperti Indonesia. Seharusnya semangat para pendiri bangsa selalu menjadi ruh pada setiap aktivitas yang berhubungan

dengan negara, bukan sekedar ambisi pribadi atau kelompok dalam pencapaian jabatan politik sampai menghalalkan segala cara yang tidak baik seperti penggunaan politik identitas.

Politik identitas dalam demokrasi elektoral Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika mobilisasi berbasis agama, etnis, maupun identitas kultural lainnya. Mietzner & Aspinall (2019) menyatakan bahwa “politik identitas telah menjadi salah satu strategi dominan dalam kontestasi politik di Indonesia, terutama karena ia mampu membangun ikatan emosional yang kuat antara pemimpin politik dan kelompok masyarakat tertentu, sehingga berfungsi sebagai alat mobilisasi yang efektif dalam demokrasi elektoral.” Pernyataan ini menegaskan bahwa politik identitas bukan sekedar fenomena sosial, tetapi juga strategi yang dimanfaatkan oleh elite untuk memperkuat posisi politik mereka dalam persaingan demokratis.

Polarisasi politik yang muncul akibat praktik politik identitas semakin jelas terlihat dalam peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017. Kontestasi Pilkada DKI 2017 menjadi titik kulminasi menguatnya politik identitas berbasis agama di ruang publik Indonesia. Polarisasi yang terjadi tidak hanya memengaruhi hasil elektoral, tetapi juga menciptakan jarak sosial yang signifikan antar kelompok masyarakat, sehingga memperdalam fragmentasi sosial dan mengikis modal sosial (Lestari, 2019). Begitu juga Aspinall (2019) yang menunjukkan bahwa pemilu 2019 melanjutkan tren polarisasi tersebut, di mana identitas agama digunakan secara eksplisit untuk menggalang dukungan, bahkan dengan risiko memperlebar jurang perpecahan di tingkat akar rumput.

Pendekatan multikulturalisme deliberatif menjadi salah satu tawaran solusi yang dapat mengurangi eksese negatif dari politik identitas. Kymlicka (2007) menekankan bahwa “multikulturalisme deliberatif menghendaki adanya ruang dialog antar kelompok identitas yang difasilitasi oleh negara, sehingga keberagaman tidak hanya diterima secara pasif, tetapi diintegrasikan ke dalam proses demokrasi yang deliberatif.” Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menuntut hadirnya kebijakan negara yang mampu memperkuat pengakuan terhadap kelompok minoritas sekaligus menghindari dominasi mayoritas yang eksklusif. Sejalan dengan itu, Taylor (1994) menegaskan bahwa “politik pengakuan (*politics of recognition*) bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan moral, tetapi juga prasyarat bagi terciptanya demokrasi yang inklusif dan stabil,” sehingga pengakuan terhadap keberagaman menjadi elemen penting dalam menjaga kohesi sosial di negara plural seperti Indonesia.

Selain itu, Isu tentang dominasi etnis tertentu, misalnya anggapan bahwa jabatan presiden selalu dipegang oleh tokoh dari suku Jawa, menunjukkan karakteristik kedua Von Beyme, yaitu tendensi membentuk “*apartheid sosial*” berbasis identitas. Narasi ini membentuk prasangka struktural yang dapat menggerogoti kepercayaan antar kelompok. Dalam perspektif Taylor, stereotip ini menghalangi *recognition* terhadap kontribusi individu dari kelompok mayoritas yang sebenarnya memiliki orientasi inklusif. Sebaliknya, stereotip tersebut juga memperkuat sikap defensif kelompok mayoritas yang merasa diserang.

Aspinall dan Mietzner (2019) menegaskan bahwa politik identitas membangun ikatan emosional yang kuat antara kandidat dan basis pemilihnya. Di Indonesia, hal ini terlihat dari keberhasilan pasangan calon yang memanfaatkan simbol agama atau etnis sebagai modal kampanye. Namun, sesuai dengan kritik Kymlicka, ikatan emosional semacam ini, jika tidak diimbangi dengan kebijakan inklusif, akan mengorbankan kohesi sosial demi kemenangan elektoral jangka pendek.

Analisis teori dan kasus di atas menunjukkan bahwa politik identitas di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi prinsip *politics of recognition* maupun *multikulturalisme deliberatif*. Praktik

yang ada justru mendekati model eksklusivisme yang mengancam integrasi nasional. Oleh karena itu, penguatan kebijakan publik yang mengedepankan pengakuan setara terhadap semua kelompok identitas menjadi keharusan. Strategi ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada ICERD dan Pasal 28I UUD 1945 yang melarang segala bentuk diskriminasi. Negara Indonesia adalah negara besar yang mendaulat diri sebagai negara yang bersatu dan kuat karena perbedaan, hal demikian harus terus diwariskan kepada para penerus agar jiwa nasionalismenya lebih terbangun daripada egosentris pada kelompok yang lebih sempit, disamping realitas bahwa banyak pembentukan negara di dunia yang dibentuk atas dasar persamaan Agama, suku bangsa, Ras, Sejarah atau pun sekedar integrasi wilayah.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa praktik politik identitas di Indonesia menampilkan tiga pola dominan yang konsisten dengan kerangka teori Von Beyme, Taylor, dan Kymlicka. Pertama, penggunaan narasi besar berbasis agama atau etnis sebagai instrumen kampanye, sebagaimana terlihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017, telah memunculkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan mengurangi ruang politik yang setara (*politics of recognition*). Kedua, polarisasi agama yang berlanjut hingga pasca pemilu menunjukkan absennya mekanisme deliberasi publik yang inklusif, sebagaimana diperingatkan oleh Kymlicka dalam konsep *multikulturalisme deliberatif*. Ketiga, penguatan stereotip etnis dan ras, seperti persepsi dominasi suku tertentu dalam kepemimpinan nasional, memperkuat eksklusivisme sosial dan menggerus kepercayaan antar kelompok.

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa politik identitas di Indonesia lebih sering digunakan sebagai strategi mobilisasi elektoral jangka pendek daripada sebagai instrumen penguatan demokrasi. Praktik ini mengabaikan prinsip pengakuan setara dan ruang dialog lintas identitas, sehingga berpotensi memperdalam fragmentasi sosial dan melemahkan kualitas demokrasi. Berdasarkan kerangka teori dan data kasus, penelitian ini merekomendasikan penerapan strategi politik yang berpijak pada *politics of recognition* untuk menjamin kesetaraan simbolik dan substantif, serta penguatan *multikulturalisme deliberatif* untuk memastikan keberagaman dikelola melalui dialog yang difasilitasi negara. Tanpa langkah-langkah tersebut, politik identitas akan terus menjadi ancaman laten bagi integrasi nasional di negara plural seperti Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdillah S, Ubed. (2002). Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Indonesiatara.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. (2015). "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas." Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 28, no. 2: 111-116.
- Aspinall, E. (2019). Polarization, Identity Politics, and Indonesia's 2019 Presidential Election. *Journal of Southeast Asian Studies*, 50(3), 377-401.
- Bakry, Umar Suryadi. (2020). Multikulturalisme & Identitas Politik Dalam Teori Dan Praktek. Depok: Rajawali Pers.
- Edward Aspinall & Marcus Mietzner, (2019). "[Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism](#)," [Bulletin of Indonesian Economic Studies](#), Taylor

- & Francis Journals, vol. 55(3), pages 295-317, September.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Fukuyama, Francis. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Palgrave Macmillan.
- Haboddin, Muhtar. (2012). "Menguatnya Politik Identitas Di Rumah Lokal." *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 1: 116-134.
- Heyes, Cressida. *Identity Politic*. USA: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007. Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Khaldun, Ibn. (2009). *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kristianus. (2016). "Politik Dan Strategi Budaya Etnik Dalam Pilkada Serentak Di Kalimantan Barat." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 1: 87-101.
- Kymlicka, W. (2007). *Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity*. Oxford University Press.
- Lestari, Dina. (2019). "Pilkada DKI 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia." *SIMULACRA* 2, no. 1: 31-37.
- Lestari, Y. S. (2018). POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA: ANTARA NASIONALISME DAN AGAMA. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19-30.
<https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (2010). *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina
- Mubarok, S. (2023). AKAR POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 6(1), 1-19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8035777>
- Rumbi, F. P. (2019). Politik Identitas Etnis Toraja sebagai Masalah Teologis: Kasus di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. *KURIOS*, 5(2), 125-138.
<https://doi.org/10.30995/kur.v5i2.104>
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton University Press.